



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
6. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat, dilantik, dan telah melaksanakan tugas dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diangkat dan ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan tidak sedang dibebaskan baik bersifat sementara maupun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat . . .

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.
- (4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam:
 - a. Lampiran I untuk Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural;
 - b. Lampiran II untuk Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. Lampiran III untuk Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Umum;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan dalam dan/atau alih tugas dari Jabatan Struktural;
 - b. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
 - c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu;yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Jabatan . . .

- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

- (1) Keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Petikan keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal diotentikasi oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 5

- (1) Setiap alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum harus ditetapkan dengan keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan adalah Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

Kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
 - a. Lampiran . . .

- a. Lampiran I untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Struktural;
- b. Lampiran II untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu;
- c. Lampiran III untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Umum;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2012.

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1198

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Kebijakan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta Puspasari, MM

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kepala BKPM			25,739,000
2	Wakil Kepala BKPM	I.a		21,974,000
3	Sekretaris Utama	I.a	17	19,360,000
4	Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran	II.a	15	10,315,000
5	Kepala Bagian Penyusunan Program	III.a	12	4,819,000
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV.a	9	2,915,000
7	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran	IV.a	9	2,915,000
8	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	III.a	12	4,819,000
9	Kepala Sub Bagian Evaluasi	IV.a	9	2,915,000
10	Kepala Sub Bagian Pelaporan	IV.a	9	2,915,000
11	Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU Pimpinan	II.a	15	10,315,000
12	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	III.a	12	4,819,000
13	Kepala Sub Bagian Peraturan Penanaman Modal	IV.a	9	2,915,000
14	Kepala Sub Bagian Peraturan Lainnya	IV.a	9	2,915,000
15	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Peraturan	IV.a	9	2,915,000
16	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	12	4,819,000
17	Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan	IV.a	9	2,915,000
18	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Hubungan Media Masa	IV.a	9	2,915,000
19	Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan	III.a	12	4,819,000
20	Kepala Sub Bagian Protokol	IV.a	9	2,915,000
21	Kepala Sub Bagian TU Pimpinan	IV.a	8	2,535,000
22	Kepala Biro Umum	II.a	15	10,315,000
23	Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	12	4,819,000
24	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Dokumen	IV.a	8	2,535,000
25	Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan	IV.a	9	2,915,000
26	Kepala Bagian Kepegawaian	III.a	12	4,819,000
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai	IV.a	9	2,915,000
28	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian	IV.a	9	2,915,000
29	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	IV.a	9	2,915,000
30	Kepala Bagian Keuangan	III.a	12	4,819,000
31	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV.a	9	2,915,000
32	Kepala Sub Bagian Gaji	IV.a	9	2,915,000
33	Kepala Sub Bagian Verifikasi	IV.a	8	2,535,000

1	2	3	4	5
34	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	III.a	12	4,819,000
35	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	IV.a	8	2,535,000
36	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	IV.a	8	2,535,000
37	Kepala Sub Bagian Keamanan	IV.a	8	2,535,000
38	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	I.a	17	19,360,000
39	Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	II.a	15	10,315,000
40	Kepala Sub Direktorat Agribisnis	III.a	12	4,819,000
41	Kepala Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	IV.a	9	2,915,000
42	Kepala Seksi Kelautan, Perikanan dan Peternakan	IV.a	9	2,915,000
43	Kepala Sub Direktorat Energi	III.a	12	4,819,000
44	Kepala Seksi Energi Terbarukan	IV.a	9	2,915,000
45	Kepala Seksi Energi Tak Terbarukan	IV.a	9	2,915,000
46	Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Mineral	III.a	12	4,819,000
47	Kepala Seksi Mineral Logam	IV.a	9	2,915,000
48	Kepala Seksi Mineral Non Logam	IV.a	9	2,915,000
49	Direktur Perencanaan Industri Manufaktur	II.a	15	10,315,000
50	Kepala Sub Direktorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka	III.a	12	4,819,000
51	Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin	IV.a	9	2,915,000
52	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka	IV.a	9	2,915,000
53	Kepala Sub Direktorat Industri Kimia	III.a	12	4,819,000
54	Kepala Seksi Industri Kimia Dasar	IV.a	9	2,915,000
55	Kepala Seksi Industri Barang Kimia dan Farmasi	IV.a	9	2,915,000
56	Kepala Sub Direktorat Industri Alat Transportasi dan Telematika	III.a	12	4,819,000
57	Kepala Seksi Industri Alat Transportasi	IV.a	9	2,915,000
58	Kepala Seksi Industri Telematika	IV.a	9	2,915,000
59	Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan	II.a	14	7,529,000
60	Kepala Sub Direktorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata	III.a	12	4,819,000
61	Kepala Seksi Jasa Perdagangan	IV.a	9	2,915,000
62	Kepala Seksi Jasa Pariwisata	IV.a	9	2,915,000
63	Kepala Sub Direktorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya	III.a	12	4,819,000
64	Kepala Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan	IV.a	9	2,915,000
65	Kepala Seksi Jasa Lainnya	IV.a	9	2,915,000
66	Kepala Sub Direktorat Kawasan Ekonomi	III.a	12	4,819,000
67	Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Khusus	IV.a	9	2,915,000
68	Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Lainnya	IV.a	9	2,915,000

1	2	3	4	5
69	Direktur Perencanaan Infrastruktur	II.a	15	10,315,000
70	Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan	III.a	12	4,819,000
71	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian	IV.a	9	2,915,000
72	Kepala Seksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	IV.a	9	2,915,000
73	Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	III.a	12	4,819,000
74	Kepala Seksi Infrastruktur Energi	IV.a	9	2,915,000
75	Kepala Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air	IV.a	9	2,915,000
76	Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya	III.a	12	4,819,000
77	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Laut	IV.a	9	2,915,000
78	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	IV.a	9	2,915,000
79	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	I.a	17	19,360,000
80	Direktur Deregulasi Penanaman Modal	II.a	15	10,315,000
81	Kepala Sub Direktorat Sektor Primer	III.a	12	4,819,000
82	Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan	IV.a	9	2,915,000
83	Kepala Seksi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan	IV.a	9	2,915,000
84	Kepala Sub Direktorat Sektor Sekunder	III.a	12	4,819,000
85	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	IV.a	9	2,915,000
86	Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	IV.a	9	2,915,000
87	Kepala Sub Direktorat Sektor Tersier	III.a	12	4,819,000
88	Kepala Seksi Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi	IV.a	9	2,915,000
89	Kepala Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya	IV.a	9	2,915,000
90	Direktur Pengembangan Potensi Daerah	II.a	15	10,315,000
91	Kepala Sub Direktorat Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	4,819,000
92	Kepala Seksi Sektor Primer	IV.a	9	2,915,000
93	Kepala Seksi Sektor Tersier	IV.a	9	2,915,000
94	Kepala Sub Direktorat Sektor Sekunder	III.a	12	4,819,000
95	Kepala Seksi Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	IV.a	9	2,915,000
96	Kepala Seksi Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	IV.a	9	2,915,000
97	Direktur Pemberdayaan Usaha	II.a	14	7,529,000
98	Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penyuluhan	III.a	12	4,819,000
99	Kepala Seksi Pembinaan	IV.a	9	2,915,000
100	Kepala Seksi Penyuluhan	IV.a	9	2,915,000

1	2	3	4	5
101	Kepala Sub Direktorat Kemitraan Usaha	III.a	12	4,819,000
102	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
103	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
104	Kepala Sub Direktorat Pelayanan Usaha	III.a	12	4,819,000
105	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
106	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
107	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	I.a	17	19,360,000
108	Direktur Pengembangan Promosi	II.a	14	7,529,000
109	Kepala Sub Direktorat Analisis Strategi Promosi	III.a	12	4,819,000
110	Kepala Seksi Analisis Target Promosi	IV.a	9	2,915,000
111	Kepala Seksi Analisis Daya Saing Promosi	IV.a	9	2,915,000
112	Kepala Sub Direktorat Fasilitas Promosi Luar Negeri	III.a	12	4,819,000
113	Kepala Seksi Wilayah Amerika dan Eropa	IV.a	9	2,915,000
114	Kepala Seksi Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	IV.a	9	2,915,000
115	Direktur Promosi Sektor	II.a	15	10,315,000
116	Kepala Sub Direktorat Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan	III.a	12	4,819,000
117	Kepala Seksi Industri Sumber Daya Alam	IV.a	9	2,915,000
118	Kepala Seksi Jasa dan Kawasan	IV.a	9	2,915,000
119	Kepala Sub Direktorat Promosi Industri Manufaktur	III.a	12	4,819,000
120	Kepala Seksi Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronika	IV.a	9	2,915,000
121	Kepala Seksi Industri Manufaktur Lainnya	IV.a	9	2,915,000
122	Kepala Sub Direktorat Promosi Infrastruktur	III.a	12	4,819,000
123	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi, Jalan dan Jembatan	IV.a	9	2,915,000
124	Kepala Seksi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Lainnya	IV.a	9	2,915,000
125	Direktur Fasilitas Promosi Daerah	II.a	15	10,315,000
126	Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan	III.a	12	4,819,000
127	Kepala Seksi Wilayah Sumatera	IV.a	9	2,915,000
128	Kepala Seksi Wilayah Kalimantan	IV.a	9	2,915,000
129	Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa dan Bali	III.a	12	4,819,000
130	Kepala Seksi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten	IV.a	9	2,915,000
131	Kepala Seksi Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali	IV.a	9	2,915,000
132	Kepala Sub Direktorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	III.a	12	4,819,000
133	Kepala Seksi Wilayah Sulawesi dan Maluku	IV.a	9	2,915,000
134	Kepala Seksi Wilayah Nusa Tenggara dan Papua	IV.a	9	2,915,000
135	Direktur Pameran dan Sarana Promosi	II.a	15	10,315,000
136	Kepala Sub Direktorat Pameran	III.a	12	4,819,000
137	Kepala Seksi Penyusunan Program dan Monitoring	IV.a	9	2,915,000
138	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi	IV.a	8	2,535,000

1	2	3	4	5
139	Kepala Sub Direktorat Media Cetak	III.a	12	4,819,000
140	Kepala Seksi Materi Promosi	IV.a	9	2,915,000
141	Kepala Seksi Publikasi dan Distribusi	IV.a	8	2,535,000
142	Kepala Sub Direktorat Media Elektronik	III.a	12	4,819,000
143	Kepala Seksi Materi Promosi	IV.a	9	2,915,000
144	Kepala Seksi Pelayanan Informasi	IV.a	8	2,535,000
145	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	I.a	17	19,360,000
146	Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral	II.a	15	10,315,000
147	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa	III.a	12	4,819,000
148	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Amerika	IV.a	9	2,915,000
149	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Eropa	IV.a	9	2,915,000
150	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	III.a	12	4,819,000
151	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Asia	IV.a	9	2,915,000
152	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika	IV.a	9	2,915,000
153	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Multilateral	III.a	12	4,819,000
154	Kepala Seksi Kerjasama Organisasi PBB	IV.a	9	2,915,000
155	Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Non PBB	IV.a	9	2,915,000
156	Direktur Kerjasama Regional	II.a	15	10,315,000
157	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Regional ASEAN	III.a	12	4,819,000
158	Kepala Seksi Kerjasama ASEAN	IV.a	9	2,915,000
159	Kepala Seksi Kerjasama ASEAN-Negara Mitra	IV.a	9	2,915,000
160	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Sub Regional ASEAN	III.a	12	4,819,000
161	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Barat Indonesia	IV.a	9	2,915,000
162	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Timur Indonesia	IV.a	9	2,915,000
163	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Intra Kawasan	III.a	12	4,819,000
164	Kepala Seksi Kerjasama APEC	IV.a	9	2,915,000
165	Kepala Seksi Kerjasama ASEM dan Kawasan Lainnya	IV.a	9	2,915,000
166	Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional	II.a	14	7,529,000
167	Kepala Sub Direktorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis	III.a	12	4,819,000
168	Kepala Seksi Asosiasi Bisnis	IV.a	9	2,915,000
169	Kepala Seksi Lembaga Bisnis	IV.a	9	2,915,000
170	Kepala Sub Direktorat Lembaga Keuangan	III.a	12	4,819,000
171	Kepala Seksi Lembaga Perbankan	IV.a	9	2,915,000
172	Kepala Seksi Lembaga Non Perbankan	IV.a	9	2,915,000

1	2	3	4	5
173	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	I.a	17	19,360,000
174	Direktur Pelayanan Aplikasi	II.a	15	10,315,000
175	Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	4,819,000
176	Kepala Seksi Aplikasi Baru	IV.a	9	2,915,000
177	Kepala Seksi Aplikasi Perluasan	IV.a	9	2,915,000
178	Kepala Seksi Aplikasi Perubahan	IV.a	9	2,915,000
179	Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sektor Sekunder	III.a	12	4,819,000
180	Kepala Seksi Aplikasi Baru	IV.a	9	2,915,000
181	Kepala Seksi Aplikasi Perluasan	IV.a	9	2,915,000
182	Kepala Seksi Aplikasi Perubahan	IV.a	9	2,915,000
183	Direktur Pelayanan Perizinan	II.a	15	10,315,000
184	Kepala Sub Direktorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	4,819,000
185	Kepala Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana	IV.a	9	2,915,000
186	Kepala Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi	IV.a	9	2,915,000
187	Kepala Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa	IV.a	9	2,915,000
188	Kepala Sub Direktorat Perizinan Sektor Sekunder	III.a	12	4,819,000
189	Kepala Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam	IV.a	9	2,915,000
190	Kepala Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia	IV.a	9	2,915,000
191	Kepala Seksi Industri Aneka	IV.a	9	2,915,000
192	Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	II.a	15	10,315,000
193	Kepala Sub Direktorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	4,819,000
194	Kepala Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana	IV.a	9	2,915,000
195	Kepala Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi	IV.a	9	2,915,000
196	Kepala Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa	IV.a	9	2,915,000
197	Kepala Sub Direktorat Fasilitas Sektor Sekunder	III.a	12	4,819,000
198	Kepala Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam	IV.a	9	2,915,000
199	Kepala Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia	IV.a	9	2,915,000
200	Kepala Seksi Industri Aneka	IV.a	9	2,915,000

1	2	3	4	5
201	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	I.a	17	19,360,000
202	Direktur Wilayah I	II.a	15	10,315,000
203	Kepala Sub Direktorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	III.a	12	4,819,000
204	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
205	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
206	Kepala Sub Direktorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi	III.a	12	4,819,000
207	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
208	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
209	Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung	III.a	12	4,819,000
210	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
211	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
212	Direktur Wilayah II	II.a	15	10,315,000
213	Kepala Sub Direktorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan	III.a	12	4,819,000
214	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
215	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
216	Kepala Sub Direktorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat	III.a	12	4,819,000
217	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
218	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
219	Kepala Sub Direktorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah	III.a	12	4,819,000
220	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
221	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
222	Direktur Wilayah III	II.a	15	10,315,000
223	Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa Barat	III.a	12	4,819,000
224	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
225	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
226	Kepala Sub Direktorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah	III.a	12	4,819,000
227	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
228	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
229	Kepala Sub Direktorat Wilayah Seluruh Sulawesi	III.a	12	4,819,000
230	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
231	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
232	Direktur Wilayah IV	II.a	15	10,315,000
233	Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa Timur	III.a	12	4,819,000
234	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
235	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000

1	2	3	4	5
236	Kepala Sub Direktorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	III.a	12	4,819,000
237	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
238	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
239	Kepala Sub Direktorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat	III.a	12	4,819,000
240	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	2,915,000
241	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	2,915,000
242	Inspektorat	II.a	14	7,529,000
243	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	8	2,535,000
244	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	II.a	15	10,315,000
245	Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program	III.a	12	4,819,000
246	Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat	IV.a	9	2,915,000
247	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Kurikulum	IV.a	9	2,915,000
248	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	8	2,535,000
249	Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi	III.a	12	4,819,000
250	Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional	IV.a	9	2,915,000
251	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis	IV.a	9	2,915,000
252	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	9	2,915,000
253	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal	II.a	15	10,315,000
254	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	III.a	12	4,819,000
255	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Perizinan	IV.a	9	2,915,000
256	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Informasi	IV.a	9	2,915,000
257	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras	IV.a	9	2,915,000
258	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	8	2,535,000
259	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan	III.a	12	4,819,000
260	Kepala Sub Bidang Data Rencana	IV.a	9	2,915,000
261	Kepala Sub Bidang Data Realisasi	IV.a	9	2,915,000
262	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Penyajian Informasi	IV.a	9	2,915,000
263	Kepala Pusat Bantuan Hukum	II.a	15	10,315,000
264	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	III.a	12	4,819,000
265	Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara	IV.a	9	2,915,000
266	Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	IV.a	9	2,915,000
267	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	8	2,535,000

1	2	3	4	5
268	Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	III.a	12	4,819,000
269	Kepala Sub Bidang Arbitrase	IV.a	9	2,915,000
270	Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa	IV.a	9	2,915,000

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
1	Pustakawan Pertama	8	2,535,000
2	Arsiparis Pertama	8	2,535,000
3	Analisis Kepegawaian Muda	9	2,915,000
4	Perancang Peraturan Perundang-undangan	9	2,915,000
5	Perencana Muda	9	2,915,000
6	Perancang Perundangan Muda	9	2,915,000
7	Perancang Peraturan Perundangan	9	2,915,000
8	Pranata Komputer	9	2,915,000
9	Perancang Perundang-undangan	9	2,915,000
10	Penilai Kelayakan Investasi	9	2,915,000
11	Penilai Kelayakan Perizinan	9	2,915,000
12	Statistisi Muda	9	2,915,000
13	Auditor Penyelia	8	2,535,000
14	Auditor Pertama	8	2,535,000
15	Auditor Muda	9	2,915,000
16	Widyaiswara Utama	13	6,023,000
17	Widyaiswara Madya	11	3,855,000
18	Widyaiswara Muda	9	2,915,000
19	Pranata Komputer Muda	9	2,915,000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
1	Analisis Rencana Program dan Anggaran	7	2,304,000
2	Pengadministrasian Rencana Program dan Anggaran	6	2,095,000
3	Analisis Laporan Rencana Program dan Anggaran	7	2,304,000
4	Analisis Peraturan Perundang-undangan	7	2,304,000
5	Pranata Humas	7	2,304,000
6	Protokol	7	2,304,000
7	Penata Administrasi	6	2,095,000
8	Pengadministrasian Umum	4	1,814,000
9	Pramu Penggandaan	3	1,727,000
10	Pengadministrasian Surat dan Dokumen	4	1,814,000
11	Caraka	3	1,727,000
12	Pengadministrasian Perencanaan Pegawai	4	1,814,000
13	Analisis Perencanaan dan Mutasi Pegawai	7	2,304,000
14	Pengadministrasian Mutasi Pegawai	4	1,814,000
15	Analisis Database	7	2,304,000
16	Pengadministrasian Pembinaan Pegawai	4	1,814,000
17	Analisis Jabatan Fungsional	7	2,304,000
18	Analisis Data Anggaran & Pembukuan	7	2,304,000
19	Bendahara Rutin	7	2,304,000
20	Bendahara Gaji dan TK	8	2,535,000
21	Pembuat Daftar Gaji dan TK	5	1,904,000
22	Verifikator Keuangan	6	2,095,000
23	Pengemudi	3	1,727,000
24	Montir	3	1,727,000
25	Teknisi	4	1,814,000
26	Pengatur Angkutan	4	1,814,000
27	Pramu Tamu	3	1,727,000
28	Pramu Telpo	4	1,814,000
29	Pengadministrasian Barang Inventaris	6	2,095,000
30	Pengadministrasian Barang Habis Pakai	6	2,095,000
31	Tenaga Kesehatan	6	2,095,000
32	Satpam	4	1,814,000
33	Perencana dan Pengkaji Sektor	7	2,304,000
34	Pengadministrasian Data Rencana Penanaman Modal	6	2,095,000
35	Pengadministrasian	4	1,814,000
36	Analisis Data Kebijakan Bidang Usaha dan Sistem Insentif	7	2,304,000

1	2	3	4
37	Analisis Data dan Kebijakan Administrasi Penanaman Modal	7	2,304,000
38	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7	2,304,000
39	Pengelola Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah	7	2,304,000
40	Pendata Pengembangan Potensi Daerah	5	1,904,000
41	Analisis Upaya Peningkatan Pemberdayaan Usaha Nasional	7	2,304,000
42	Pengevaluasi Kegiatan Kemitraan Usaha	7	2,304,000
43	Analisis Asosiasi Dunia Usaha	7	2,304,000
44	Analisis Strategi Promosi	7	2,304,000
45	Analisis Fasilitasi Promosi Luar Negeri	7	2,304,000
46	Pengadministrasian Data Pengembangan Promosi	6	2,095,000
47	Analisis Promosi Sektor Industri Sumber Daya Alam	7	2,304,000
48	Analisis Promosi Sektor Jasa dan Kawasan	7	2,304,000
49	Analisis Promosi Sektor Industri Manufaktur	7	2,304,000
50	Analisis Promosi Sektor Industri Infrastruktur	7	2,304,000
51	Analisis Promosi Sektor Infrastruktur	7	2,304,000
52	Pengadministrasian Data Promosi Sektor	6	2,095,000
53	Pengadministrasian Data Promosi	6	2,095,000
54	Analisis Bahan Promosi Wilayah	7	2,304,000
55	Penyusunan Program dan Monitoring	7	2,304,000
56	Penyelenggaraan Pameran	5	1,904,000
57	Penyusunan Bahan Pameran	7	2,304,000
58	Pendistribusi dan Publikasi Pameran	5	1,904,000
59	Penyusunan Bahan Promosi Elektronika	7	2,304,000
60	Pelayanan Informasi	5	1,904,000
61	Pengadministrasian Sarana Promosi	6	2,095,000
62	Analisis Data Kerjasama Wilayah Amerika dan Eropa	7	2,304,000
63	Analisis Data Kerjasama Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	7	2,304,000
64	Pengadministrasian Data Kerjasama Bilateral & Multilateral	6	2,095,000
65	Analisis Data Kerjasama Organisasi PBB dan Non PBB	7	2,304,000
66	Analisis Data Kerjasama Organisasi WTO	7	2,304,000
67	Analisis Data Kerjasama Regional	7	2,304,000
68	Analisis Data Kerjasama Organisasi ASEAN	7	2,304,000
69	Analisis Data Kerjasama Sub Regional	7	2,304,000
70	Analisis Data Kerjasama Dalam Negeri	7	2,304,000
71	Analisis Data Kerjasama Organisasi APEC	7	2,304,000
72	Pengadministrasian Data Kerjasama Regional	6	2,095,000
73	Analisis Data Kerjasama Organisasi ASEM	7	2,304,000
74	Pengelola Data Penyiapan Kerjasama Luar Negeri	7	2,304,000
75	Pengelola Data Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	7	2,304,000
76	Pengelola Data Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri	6	2,095,000
77	Analisis Aplikasi Perubahan	7	2,304,000
78	Analisis Aplikasi Baru	7	2,304,000
79	Analisis Aplikasi Perluasan	7	2,304,000

1	2	3	4
80	Pengadministrasi Aplikasi	6	2,095,000
81	Pengadministrasi Pelayanan Perizinan	6	2,095,000
82	Analisis Izin Usaha Tetap dan Angka Pengenal Importir Terbatas Sektoral	7	2,304,000
83	Analisis Tenaga Kerja Asing Sektoral	7	2,304,000
84	Verifikator Bahan Baku Sektor Primer dan Tersier	7	2,304,000
85	Pengadministrasi Fasilitas Penanaman Modal	6	2,095,000
86	Verifikator Bahan Baku Sektor Sekunder	7	2,304,000
87	Analisis Data Proyek PMA/PMDN	7	2,304,000
88	Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Primer	7	2,304,000
89	Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Tersier	7	2,304,000
90	Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Sekunder	7	2,304,000
91	Pengadministrasi dan Pengarsip Dokumen Audit	6	2,095,000
92	Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan	7	2,304,000
93	Pengumpul Data dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan	6	2,095,000
94	Analisis Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	7	2,304,000
95	Teknisi Aplikasi Komputer	7	2,304,000
96	Analisis Data Penanaman Modal	7	2,304,000
97	Pengelola Help Desk	7	2,304,000
98	Teknisi Jaringan	7	2,304,000
99	Pengadministrasi Data dan Informasi	4	1,814,000
100	Statistisi	7	2,304,000
101	Pengelola Data Center	7	2,304,000
102	Analisis Pertimbangan Hukum	7	2,304,000
103	Analisis Bantuan Hukum	7	2,304,000
104	Pengadministrasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	6	2,095,000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI